

BAB II

Kajian Pustaka

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan Akuntansi yaitu seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.¹² Sedangkan pengertian Akuntansi secara umum yaitu mengidentifikasi transaksi dimana diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikthisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk pengertian syariah yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk dipatuhi oleh orang Islam dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah.¹⁴ Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia memiliki 2 alasan utama yaitu : suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah (Wirosa, 2011)¹⁵

Akuntansi syariah menurut Iwan Triwuyono dan Gaffkin dikatakan, merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transedental, dan teologikal.¹⁶

¹²*Ibid*, Muhamad, hal : 7

¹³*Ibid*, Sri Nurhayati dan Wasilah, hal 9

¹⁴*Ibid*, Muamar Khaddafi, dkk, hal 3

¹⁵*Ibid*, Sri Nurhayati dan Wasilah, hal 9

¹⁶*Ibid*, Muhamad, hal 151.

2. Tujuan Akuntansi Syariah

Secara umum tujuan akuntansi syariah yaitu :¹⁷

- a) Membantu mencapai keadilan sosial-ekonomi (*Al-Falah*)
- b) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb, sebagai bentuk ibadah.

3. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah¹⁸

a. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandung. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah di amanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Prinsip keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah:282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi Syariah dapat diterangkan.

¹⁷*Ibid*, Muamar Khaddafi, hal 16

¹⁸*Ibid*, Muamar Khaddafi, hal 17

B. Standar Akuntansi dalam Penyajian Laporan Keuangan

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Jusuf al Haryono, 2011¹⁹). Akuntansi juga didefinisikan dari dua sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Ditinjau dari sudut pandang pemakainnya, akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan suatu entitas. Adapun definisi akuntansi dari sudut pandang kegiatannya, yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat financial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk memberikan keputusan.²⁰

Ada beberapa definisi akuntansi diantaranya : Littleton mendefinisikan tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

APB (*Accounting Principle Board*) *Statement* No.4 mendefinisikan sebagai berikut : “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan Akuntansi yaitu seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan

¹⁹ Pandapotan Ritonga, “*analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109*”, Jurnal Volume 1 No. 1. 2017, hal: 4

²⁰ Siti Nur Indah, Skripsi : “*Komparasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Yang Sahamnya Listing di Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) Periode juni-November 2016*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hal : 16

cara tertentu dan dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.²¹

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dinyatakan akuntansi adalah “proses mengidentifikasi mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainnya”.

2. Pernyataan Standar Akuntansi

Pernyataan standar akuntansi keuangan merupakan aturan dan pedoman bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi yang baik, laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan dapat menciptakan transparansi bagi perusahaan. Standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan berwenang, maka standar akuntansi adalah bagian dari prinsip akuntansi berterima umum. “standar akuntansi memberikan aturan-aturan umum yang bersifat praktis untuk membantu pekerjaan akuntan”.(Ghazali dan Chariri, 2007).

3. Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan.

Ada empat pilar standar akuntansi keuangan :²²

a) Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan merupakan pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia²³. SAK Digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi penuh IFRS mulai tahun 2012.

b) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

²¹*Ibid*, Muhamad, hal : 7

²²*Ibid*, Ilham satria, hal : 3

²³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Penyajian laporan keuangan syariah*, (Jakarta : Graha Akuntan, 2014) hal : 3

Penggunaan SAK ETAP akan memudahkan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan menyusun laporan keuangan karena SAK ETAP lebih mudah dan sederhana.

c) Standar Akuntansi Syariah (SAS)

Dewan standar akuntansi keuangan IAI atas persetujuan badan pelaksana harian dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia telah menyusun secara khusus kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.

d) Standar Akuntansi Pemerintah

Pertama kali terbit berdasarkan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tanggal 13 juni 2005. Kemudian diubah berdasarkan peraturan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tanggal 22oktober 2010 yang ada dasarnya sudah menggunakan basis akrual.

4. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah²⁴. Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun untuk tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum. Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan.²⁵ Menurut Bustaman (2015) laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasandari transkasi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan hanya untuk para pemilik.²⁶

Penyajian laporan keuangan merupakan sutau proses untuk melaporkan atau menyajikan keadaan keuangan suatu entitas atau lembaga bagi pihak yang membutuhkan.

²⁴*Ibid*, Ikatan Akuntan Indonesia, hal : 4

²⁵*Ibid*, Ilham satria, hal : 2

²⁶ Rini Wahyuni, Skripsi : “*analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 pada PT. Bank Muamalat Indonesia*”, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), hal : 23

Dalam penyajian laporan keuangan standar akuntansi sangat diperlukan, berikut beberapa alasan mengapa standar akuntansi memiliki peran penting dalam penyajian laporan keuangan :

- 1) Memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan.
- 2) Memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan.
- 3) Memberi data dasar bagi perusahaan tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi dan peningkatan efisien dan tujuan sosial.
- 4) Mengahsilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi.

C. Laporan keuangan (PSAK No.101)

1. PSAK No. 101 (Tahun 2007)

PSAK No.101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indoensia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 : *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

PSAK No. 101 merupakan pernyataan yang bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas syariah lain.²⁷ Pernyataan ini mengatur persyaratan (pengakuan, pengukuran, pengungkapan transaksi dan peristiwa lain), penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dapat diketahui bahwa laporan keuangan harus menyajikan seacar wajar posisi keuangan,

²⁷Ikatan Akuntan Indonesia, *Penyajian laporan keuangan Syariah*, (Jakarta : Graha Akuntan, 2014) hal : 1

kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan.²⁸

Berdasarkan PSAK No.101. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas :

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan atas laporan keuangan.

D. Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Syariah

Dalam menjalankan suatu usaha, lembaga atau entitas syariah perlu memerlukan standar pencatatan akuntansi. Terutama dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan pada sistem pencatatan laporan keuangan. Untuk menyusun suatu laporan keuangan diperlukannya standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan suatu lembaga atau entitas syariah untuk menyusun laporan keuangan, salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang “penyajian Laporan Keuangan Syariah”.²⁹

Hubungan Bank syariah dengan PSAK 101 sangat berkaitan dimana transaksi-transaksi dasar pada penyusunan laporan keuangan syariah memuat tentang kegiatan transaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa menyewa dan tidak terjadi sistem monopoli. Peran bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggungjawab mengelola dana. Laporan keuangan bank syariah sangat diperlukan bagi pengguna. Mengingat bahwa laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menggambarkan keadaan dan kemajuan perusahaan atau lembaga serta sebagai media untuk melakukan audit atau

²⁸ Nur Hisamduddin, eka, “Presepsi mengenai wajar dan benar dalm penyajian laporan keuangan entitas syariah”, UNEJ : Jurnal Akuntansi, 2018, hal : 64

²⁹ Sutarti dkk, “Evaluasi atas penerapan PSAK 101 dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan pada PT. Bank Jabar banten Syariah”, STIE Bogor, jurnal Volume 12 No. 2, oktober 2012, hal : 104.

kepentingan lainnya. Dengan berbagai kegunaan tersebut, lembaga perlu membuat laporan keuangan dengan penyajian rutin, akurat, mudah dipahami, dapat dibandingkan, serta dapat diaudit. Dimana sesuai dengan PSAK No. 101.

1. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

Al-Qur'an sebagai hukum dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah yang berwujud institusi adalah ketika Rasulullah Muhammad saw mendirikan Baitulmal saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. Baitulmal di zaman Rasulullah merupakan lembaga penyimpanan kekayaan Negara. Pada saat itu, Baitulmal memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan Negara. (Rizal yaya, dkk 2009:16).³⁰

2. Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan.³¹

Dalam rangka untuk bisa mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi :

- a. aset
- b. liabilitas
- c. dana syirkah temporer
- d. ekuitas
- e. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian

³⁰*Ibid*, Muamar Khaddafi, hal : 145

³¹*Ibid*, IAI, hal : 4

- f. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
- g. arus kas
- h. dana zakat
- i. dana kebajikan.

Informasi tersebut, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan, dan khususnya dalam waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.³²

3. Pemakai laporan keuangan

Pemakai laporan keuangan meliputi :³³

- a) Investor.
- b) Pemilik dana qardh.
- c) Pemilik dana syirkah temporer.
- d) Pemilik dana titipan.
- e) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
- f) Pengawas syariah
- g) Karyawan
- h) Pemasok dan mitra usaha
- i) Pelanggan
- j) Pemerintah
- k) Masyarakat.

4. Unsur-unsur Laporan Keuangan lembaga Syariah

Laporan keuangan menjelaskan tentang kondisi keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang terjadi dalam suatu entitas. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya.³⁴

Berdasarkan PSAK No. 101 unsur-unsur laporan keuangan bank syariah yaitu³⁵:

- a. Laporan posisi keuangan (Neraca)

³²*Ibid*, IAI, hal : 4

³³ *Ibid*, Muamar Khaddafi, hal : 95

³⁴*Ibid*, Ilham satria, hal : 9

³⁵ Putriningtyas, Skripsi : “*Analisis penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 pada BMT Mandiri Boyolali*”, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2019)hal : 22

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait sumber daya, struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Nurhayati dan Wasilah, 2014:9). Penyajian laporan posisi keuangan entitas syariah minimal mencakup penyajian pos-pos berikut :

- 1) Kas dan setara kas
 - 2) Piutang usaha dan piutang lainnya
 - 3) Persediaan
 - 4) Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu.
 - 5) Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan a, b, c, dan d)
 - 6) Total aset yang dikelompokkan dalam aset untuk dijual dan aset dalam kelompok lepasan untuk dijual sesuai dengan PSAK 58
 - 7) Properti investasi
 - 8) Aset tetap
 - 9) Aset tak berwujud
 - 10) Utang usaha dan terutang lainnya
 - 11) Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan i dan o)
 - 12) Liabilitas dan aset untuk pajak kini
 - 13) Liabilitas dan aset pajak tangguhan
 - 14) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan dimiliki untuk dijual
 - 15) Provisi
 - 16) Kepentingan non pengendali
 - 17) Modal saham dan cadangan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
- b. Laporan Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
- Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan kinerja atau kegiatan entitas syariah pada periode tertentu yang meliputi penghasilan dan beban yang timbul dari kegiatan utama entitas syariah dan kegiatan operasi lainnya (Muljono, 2015 :321). Seluruh pos penghasilan dan beban diakui dalam suatu periode laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen komprehensif lain. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi meliputi pos-pos sebagai berikut (IAI, 2014 :101.15).

1. Pendapatan usaha
2. Bagi hasil untuk pemilik dana
3. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas
4. Beban pajak
5. Jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan

Pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan disajikan dalam laba rugi komprehensif. Pos-pos tersebut diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan berdasarkan SAK.

c. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan penambahan atau pengurangan ekuitas yang dimiliki entitas syariah yang menggambarkan kenaikan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan entitas syariah (Muljono, 2015:376). Informasi yang harus disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yaitu (IAI, 2014: 104.9) :

1. Total penghasilan komprehensif selama satu periode
2. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif setiap komponen ekuitas yang diakui sesuai PSAK 25.
3. Rekonsiliasi setiap komponen ekuitas, secara terpisah mengungkapkan perubahan dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain dan transaksi pemilik dalam kemampuannya sebagai pemilik.

Entitas syariah wajib menyajikan analisis komprehensif lain berdasarkan pos setiap komponen ekuitas baik dalam laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan. Jumlah deviden yang diakui sebagai atribusi pemilik selama periode dan jumlah deviden per saham juga disajikan dalam laporan keuangan dan catatan laporan keuangan.

d. Laporan arus kas

Persyaratan pengungkapan dan penyajian laporan arus kas berdasarkan pada PSAK laporan arus kas memberikan dasar bagi pengungkapan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas (IAI, 2014:101.20). laporan ini berisi arus kas masuk dan arus kas keluar

entitas syariah. Dalam laporan arus kas terdapat beberapa aktivitas yaitu :
(Muljono, 2015 : 384) :

1. Sumber dan penggunaan kas kegiatan operasional

Arus kas pada kegiatan operasional entitas syariah menggambarkan adanya perubahan pada kas masuk entitas syariah dari penjualan barang atau jasa setelah dikurangi dengan kas yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Sumber dan penggunaan kas kegiatan investasi

Arus kas kegiatan investasi menggambarkan perubahan kas yang digunakan untuk pembelian barang ekuitas seperti mobil, peralatan baru, komputer dan sebagainya. Dalam kegiatan investasi disini juga mencakup akuisis bisnis lainnya dan investasi dalam instrumen lainnya.

3. Sumber dan penggunaan kas kegiatan pendanaan

Arus kas kegiatan pendanaan menggambarkan perubahan kas akibat adanya pendanaan atau pengambilan dana dari atau kepada pemegang saham, calon pemegang saham atau kreditur. Arus kas masuk kegiatan pendanaan ini biasanya terdiri dari hasil penjualan saham. Obligasi atau pinjaman dari bank. Sedangkan arus kas keluar biasanya terdiri dari pembayaran beban bunga, pembelian saham, pembayaran angsuran hutang dan pembiayaan deviden.

e. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

Laporan ini menggambarkan sumber dan penggunaan dana zakat entitas syariah pada periode tertentu. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan (IAI, 2014: 101.20)

1. Dana zakat dari wajib zakat dalam entitas syariah maupun luar entitas syariah

2. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat

3. Kenaikan atau penurunan dana zakat

4. Saldo awal dana zakat

5. Saldo akhir dana zakat

f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan entitas syariah, yang menunjukkan (IAI: 2014.20)

1. Sumber dana kebajikan
 2. Penggunaan dana kebajikan
 3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
 4. Saldo awal dana kebajikan
 5. Saldo akhir dana kebajikan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan dari hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi (IAI, 2014:101.21) :

- a) Informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan
- b) Pengungkapan informasi yang disyaratkan dalam SAK dan tidak disajikan dalam bagian laporan keuangan manapun
- c) Informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam praktiknya entitas syariah harus menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Entitas harus membuat referensi silang atas setiap pos dalam setiap laporan keuangan untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Perlunya Akuntansi Syariah bagi lembaga keuangan syariah.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) disebutkan, bahwa tujuan akuntansi keuangan bagi lembaga keuangan syariah adalah :³⁶

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan

³⁶ Ibid, Muhamad, hal : 196

- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

E. Bank Syariah

1. Sistem Perbankan Syariah

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dalam proses melakukan kegiatan usahanya.³⁷

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, dan lain sebagainya.³⁸

Menurut Rani Hartatika (2018) berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, pengertian bank adalah : Bank Merupakan suatu badan yang kegiatannya dibidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Falsafah yang harus ditetapkan oleh Bank Syariah.³⁹

Bank Syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial.⁴⁰

2. Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip Muamalah :

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qu'an dan Sunnah Rasul (Prinsip Mubah).

³⁷ Nur Afifah Kumalasari, " *Study empiris penilaian laporan keuangan bank syariah di Inodnesia berdasarkan Standar IFRS dan AAOFI*", Jurnal Volume 05 No. 02, juni 2018, hal : 49

³⁸ *Ibid*, Muamar Khaddafi, hal : 145

³⁹ Rini Wahyuni, Skripsi : " *Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 pada PT. Bank Muamalat Indonesia*", (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2019) hal : 16

⁴⁰ *Ibid*, Muhamad, hal : 177.

- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela)
 - 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan mengingdarkan mudharat dalm hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat).
 - 4) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).⁴¹
3. Kewajiban Perbankan Syariah yang menggunakan PSAK Syariah di Indonesia

Penetapan PSAK Syariah sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah dengan tujuan untuk meningkatkan transparasi kondisi keuangan bagi Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, agar penyusunan laporan keuangan menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industry perbankan syariah.

Tujuan dari penyusunan PAPSI antara lain :⁴²

- a. Memebantu Bank menyusun laporan keuangan supaya sesuai dengan tujuan laporan keuangan.
- b. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan Bank.
- c. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Bank dalam menyusun laporan keuangan.

⁴¹ *Ibid*, Muamar Khaddafi, hal : 146

⁴² Haim Alamsyah, *Pelaksanaan PAPSI*, Jakarta : Bank Indoneisa 2013, hal : 4

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Rini Wahyuni, 2020	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No 101 Pada PT. Bank Muamalat Indoensia TBK.	PT. Bank Muamalat Indoensia Tbk. Dalam menyajikan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014, karena belum menyajikan pembagian akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan.
2.	R.Sanjaya Silalahi, 2012	Analisis penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai-Pekanbaru	BMT Al Ittihad Rumbai-Pekanbaru memperlihatkan bahwa laporan keuangannya tidak sesuai dengan PSAK 101, BMT Al Ittihad Rumbai-Pekanbaru lebih mengacu pada PSAK 59, namun juga tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 59. Seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tidak disajikan, karena pihak-pihak dari BMT Al Ittihad Rumbai-Pekanbaru hanya membutuhkan laporan neraca dan laba-rugi saja, sehingga laporan sumber dan penggunaan dana zakat maupun laporan sumber dana kebajikan tidak disajikan oleh BMT Al Ittihad Rumbai-Pekanbaru.
3.	Meri Mona Sri Yanti, 2018	Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 101 dan No. 105 pada Bank syariah Mandiri Medan	Penerapan akuntansi mudharabah di Bank syariah mandiri medan khususnya pada implementasi akuntansi transaksi mudharabah sudah sesuai dengan PSAK NO. 101 dan No. 105
4.	Nindi Riyana Saputri, 2016	Penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indoensia (PAPSI) pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada BPRS Bandar Lampung)	Perlakuan akuntansi pada pembiayaan dalam hal penerapan PAPSI pada pembiayaan murabahah dapat diketahui bahwa BPRS Bandar Lampung sepenuhnya sudah sesuai dengan PAPSI Tahun 2013 bagian IV.

5.	Mega Diana Putri, 2019	Analisis penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan perbankan syariah (studi kasus BPRS Hasanah Kota pekanbaru)	Penerapan PSAK 101 pada bank syariah Hasanah Pekan baru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum didalam akuntansi syariah.
----	------------------------	---	---

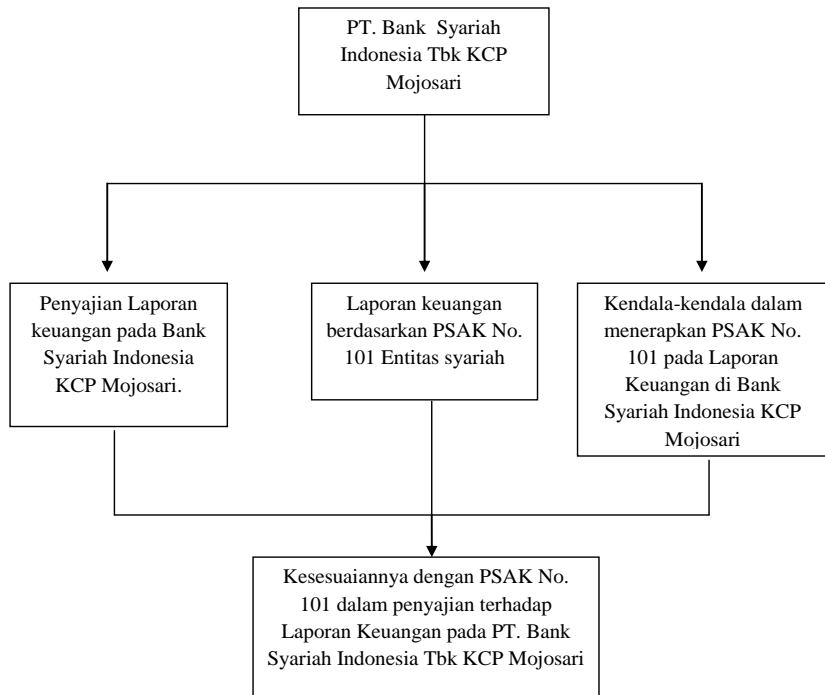
Sumber : diolah peneliti, 2021

G. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan gambaran terhadap alur pemikiran penelitian agar lebih jelas, maka akan dijelaskan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

KERANGKA KONSEPTUAL



Sumber : diolah peneliti, 2021